

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Suru Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori tinggi dan aktif. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan warga dalam berbagai tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, serta dukungan penuh dari pemerintah desa turut memperkuat terciptanya proses demokrasi yang tertib, transparan, dan inklusif. Persentase kehadiran pemilih yang mencapai lebih dari 90% menjadi indikator utama bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya menggunakan hak pilih dalam menentukan kepemimpinan di daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun secara kuantitatif partisipasi masyarakat tinggi, secara kualitatif masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman substansial terhadap proses demokrasi. Beberapa warga diketahui hanya terlibat dalam tahap pencoblosan tanpa partisipasi dalam tahapan lainnya, serta masih ditemukan praktik politik transaksional dalam skala kecil. Faktor-faktor seperti kesadaran politik dan pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai warga negara masih perlu diperkuat agar partisipasi masyarakat

tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kedewasaan politik dan tanggung jawab kewarganegaraan yang utuh.

## **5.2 SARAN**

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat di Desa Suru, disarankan agar pemerintah desa, penyelenggara pemilu, serta tokoh masyarakat secara kolaboratif menyelenggarakan program pendidikan politik yang berkelanjutan. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui forum diskusi warga, sosialisasi berbasis kelompok usia, pemanfaatan media sosial, dan pelatihan kader desa yang berorientasi pada penguatan literasi politik. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran politik yang lebih kritis dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara substansial dalam seluruh tahapan pemilu.

Selain itu, pengawasan terhadap praktik politik uang perlu diperkuat dengan melibatkan elemen masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. Pemerintah desa juga diharapkan dapat meningkatkan fasilitasi dan dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konstitusional dan pentingnya integritas dalam pemilihan umum. Dengan demikian, diharapkan Pilkada selanjutnya dapat menjadi wahana demokrasi yang lebih matang, partisipatif, dan berkeadilan, serta mampu melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.